

|                                                                                   |                                                                                        |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>News Title :</b> Transaksi Bursa CPO Masih Kecil, Bappepti: Yang Penting Jalan Dulu |                                             |
|                                                                                   | <b>Media Name :</b> tempo.co                                                           | <b>Journalist :</b> Defara Dhanya Paramitha |
|                                                                                   | <b>Publish Date :</b> 02 November 2023                                                 | <b>Tonality :</b> Positive                  |
|                                                                                   | <b>News Page :</b> 1                                                                   | <b>News Value :</b> 2,250,000               |
|                                                                                   | <b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)                                | <b>Ads Value :</b> 750,000                  |
|                                                                                   | <b>Section/Rubrication :</b> Bisnis                                                    | <b>Topic :</b> Bursa CPO                    |

Transaksi Bursa CPO Masih Kecil, Bappepti: Yang Penting Jalan Dulu

Reporter

Defara Dhanya Paramitha

Editor

Grace gandhi

Kamis, 2 November 2023 14:41 WIB

Bagikan



Suasana Kantor ICDX saat perdana "Live Transaksi Perdagangan CPO Melalui Bursa Berjangka" di Kantor ICDX, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Oktober 2023. Pendirian bursa ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak kelapa sawit dunia. Selama ini harga acuan CPO Indonesia berdasarkan pada harga dari bursa Rotterdam dan Malaysia. Tempo/Tony Hartawan

IKLAN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) periode 2022-2023, Didid Noordiatmoko, mengatakan akan terus mengupayakan peningkatan transaksi di Bursa *Crude Palm Oil* (CPO) yang telah diluncurkan pada 13 Oktober dan mulai beroperasi efektif pada 20 Oktober lalu.

"Transaksi pertama itu sangat kecil. Tapi kami sebagai regulator, yang penting jalan dulu, kami tahu ini perlu waktu untuk bursa ini bisa dipercaya," ujar Didid dalam acara Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-19 atau IPOC 2023 di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis, 2 November 2023.

Baca Juga:

Mengenal Apa Itu Paylater, Manfaat, dan Kerugiannya

Didid mengatakan pemerintah menargetkan bursa ini sudah bisa dipercaya pada semester I 2024. "Ini sambil jalan terus, tapi yang pertama kita ingin bangun bursa yang kredibel, fair, dan transparan," tuturnya. Namun, menciptakan bursa yang kredibel, kata Didid, merupakan tantangan besar bagi pemerintah.

Saat ini, Bappebti telah menunjuk Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Group sebagai penyelenggara Bursa *Crude Palm Oil* (Bursa CPO). "Karena sifatnya *voluntary*, tentu dibutuhkan berbagai insentif agar **perdagangan** CPO ini bisa dilakukan melalui bursa," tutur Didid.

Insentif ini, kata dia, dapat berupa penurunan bea keluar. "Artinya begini, walaupun ini lokal, tapi ekspor yang menggunakan dari bursa ini kira-kira apakah bisa diberi bea keluar yang lebih baik, lebih bagus, misal seperti itu," tuturnya. Dapat pula pemberian insentif dengan alternatif lain yakni terkait Pajak Penghasilan atau PPH badan.

Baca Juga:

Tutup Sesi Perdagangan di Zona Hijau, IHSG Hari Ini Menguat ke Level 6.751,3

IKLAN

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

Namun, progres dari pemberian insentif ini masih jauh dari kata siap. "Sudah sampai mana? Belum terlalu jauh, karena ini masih berupa kajian," ucapnya. Kajian ini harus dibuktikan dengan kondisi di lapangan. "Setelah itu baru dibicarakan lebih intens lagi, lebih nyata lagi, jadi bukan asumsi. Kalau sekarang kan masih asumsi."

Ke depan, **insentif** ini akan dikordinasikan terlebih dahulu dengan berbagai kementerian dan lembaga.